

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya dalam melakukan kejahatan seseorang akan menggunakan alat atau barang untuk memudahkannya melakukan sesuatu yang kemudian alat atau barang ini disebut barang bukti. Selain itu, dalam tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan, penipuan, dan pencurian, barang bukti dikategorikan sebagai barang-barang yang didapat dari hasil kehendak suatu tindak pidana tersebut misalnya yakni kendaraan bermotor dalam tindak pidana pencurian, dan benda-benda yang memiliki nilai ekonomis relatif tinggi lainnya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang.¹ Mengenai barang bukti ini tidak dijelaskan secara konkrit terkait definisinya didalam KUHAP maupun undang-undang lainnya, namun di beberapa pasal dalam KUHAP, HIR, dan Undang-Undang lainnya menyebutkan tentang barang bukti, seperti yang disebutkan dalam HIR Pasal 63 sampai 67, bahwa barang bukti merupakan barang mengenai dimana delik tersebut dilakukan atau objek delik dan barang dengan mana delik dilakukan atau alat yang dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.² Sehingga, barang bukti ini sangat penting dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. Peranan barang bukti bagi penyidik yaitu untuk mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti digunakan sebagai dasar

¹ HMA. Kuffal. 2013. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah*. Malang. Penerbit UMMPress. Hal. 5-9.

² Lihat pasal 63, 64, 65, 66, 67 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).

untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sedangkan bagi hakim, barang bukti sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.³

Biasanya barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP), diserahkan atau disita dari pihak ketiga yang tersangkut pada suatu perkara pidana, dan dapat pula berupa barang temuan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu adalah menguasai untuk sementara waktu guna kepentingan dalam proses peradilan pidana atau yang biasa disebut penyitaan.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 16, Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan proses peradilan pidana. Selain itu, Pasal 39 KUHAP telah memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, bahwa benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda- benda tersebut tidak dapat dilekatkan sita.⁵ Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah dijelaskan prinsip hukum didalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda tersebut dapat diberikan atau dilekatkan

³ Kuffal. *Op.Cit.*

⁴ Ratna Nurul Alfiah. 2001. *Barang bukti sitaan Dan Rampasan Negara*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 5.

⁵ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 274-275.

penyitaan. Tujuan utama adanya penyitaan ditujukan sebagai barang bukti sitaan di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti sitaan, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti sitaan, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses peradilan pidana. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses peradilan dari suatu tindak pidana.⁶ Penyitaan mengandung arti bahwa benda milik seseorang tersebut dilepaskan dari pemiliknya untuk keperluan proses peradilan pidana, namun hak milik dari benda tersebut tidak terlepas dari si pemiliknya. Penyimpanan ini hanya bersifat sementara, sampai benda tersebut dianggap sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan atau menunggu perkara berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 46 KUHAP menjelaskan akibat hukum dari barang bukti sitaan dalam proses peradilan pidana, yaitu dapat dirampas atau dikembalikan kepada yang berhak.⁷ Dengan kata lain apabila penyitaan tersebut tidak dirampas oleh negara maka akan dikembalikan kepada yang berhak. Namun apabila barang bukti sitaan tersebut diputus oleh hakim untuk dirampas, maka akan diambil alih dari pemiliknya dengan tujuan untuk mencabut status hak

⁶ *Ibid.* Hal. 6-10.

⁷ *Ibid.*

milik atas barang itu. Misalnya barang bukti sitaan hasil tindak pidana korupsi berupa kendaraan bermotor yang dirampas untuk negara, dimana tujuan dari perampasan barang bukti sitaan ini adalah akan dilakukannya pelelangan untuk mengembalikan keuangan dan kerugian negara.

Mengingat akibat hukum dari barang bukti sitaan dalam proses peradilan pidana adalah dapat dirampas atau dikembalikan kepada yang berhak, menunjukkan bahwa barang bukti sitaan tersebut harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dan penyimpanan barang bukti sitaan yang digunakan untuk kepentingan proses peradilan pidana.⁸ Sehingga pembuat Undang-Undang berusaha untuk menjaga dan mengkoordinasikan dengan baik dalam hal penyimpanan barang bukti sitaan. Hal ini didasarkan dalam amanat Pasal 44 KUHAP yang menyatakan bahwa:

1. “Barang bukti sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan barang bukti sitaan negara.
2. Penyimpanan barang bukti sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.”⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat Pasal 44 KUHAP.

Artinya, pengelolaan dan perawatan barang bukti sitaan harus dilakukan dengan baik oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.

Salah satu proses peradilan pidana yang membutuhkan barang bukti sitaan diantaranya adalah Penuntutan. Dimana lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan.¹⁰ Tugas dan wewenang kejaksaan dalam hal penuntutan dilakukan oleh seorang Penuntut Umum atau jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam proses penuntutan di Kejaksaan, penuntut umum juga sangat membutuhkan adanya barang bukti yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP menyebutkan apabila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Itu artinya Barang bukti tersebut dialihkan kepada kejaksaan oleh penyidik kepolisian sebagai penuntut umum dalam rangka untuk menyelidiki, memproses lebih lanjut, dan juga untuk merawat barang bukti sitaan tersebut. Karena dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan

¹⁰ Lihat Pasal 2 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kepada pemilik yang sah. Salah satu contoh barang bukti sitaan adalah kendaraan bermotor yang bisa berupa bus, Mobil, Motor dan lain sebagainya.

Kemudian penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa selama belum ada RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang bukti sitaan Negara) ditempat yang bersangkutan, penyimpanan barang bukti sitaan salah satunya dapat diletakkan di Kejaksaan.¹¹ Artinya, bahwasanya kejaksaan memang memiliki kewenangan dalam merawat dan mengelola barang bukti sitaan ketika dalam proses penuntutan berlangsung, mengingat tidak adanya RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang bukti sitaan Negara) di Kota Malang. Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan barang bukti sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Kejaksaan menerbitkan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP.¹² Pengelolaan dan perawatan tersebut sangat penting demi keutuhan barang bukti sitaan yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian pada proses peradilan.¹³ Keutuhan barang bukti sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan proses peradilan pidana saja, melainkan juga memberikan rasa aman kepada tahanan atau pihak yang berperkara terhadap barang bukti sitaannya

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP.

¹²Riset Publik. *Pengelolaan Barang bukti sitaan Dan Rampasan*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2019.

¹³ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 278.

serta memberikan jaminan penyelamatan aset Negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.¹⁴

Jika dilihat kembali, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP, saat proses Penuntutan, Kejaksaan mempunyai tanggungjawab yuridis dan tanggungjawab fisik terhadap barang bukti sitaan. Kejaksaan harus mengelola dan merawat barang bukti sitaan sesuai amanat undang-undang, apabila perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan tersebut tidak dilakukan dengan baik dapat berakibat pada kerusakan barang bukti sitaan hingga akhirnya kualitas barang bukti sitaan tersebut dapat menurun. Bila kualitasnya menurun, maka nilai ekonomisnya bisa merosot, dan negara bisa merugi, bila harga lelang dipatok kecil karena adanya kerusakan barang bukti sitaan. Namun, apa yang diamanatkan undang-undang untuk mengelola dan merawat barang bukti sitaan belum dijalankan dengan baik oleh beberapa kejaksaan negeri di Indonesia.¹⁵ Diantaranya yang terjadi di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, dimana karat mulai menggerogoti sepeda kayuh, puluhan motor yang berjejer di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sebagian di antaranya sudah menyerupai besi tua. Puluhan motor berbagai merek berjajar rapi. Ada yang ditutup dengan terpal, ada juga yang ditumpuk tak beraturan. Beberapa nyaris menjadi barang rongsokan. Begitu pula mobil yang berada di belakang kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Mobil terparkir

¹⁴ Maria Prisilia Djapai. 2017. *Pengelolaan Barang bukti sitaan Menurut Pasal 44 Kuhap*. Jurnal *Lex Crimen*. Vol. 7 No. 7. Hal. 42.

¹⁵ Ali Sodikin. *Mirip Gudang Rongsokan, Warga Enggan Mengambil Kendaraanya*. <https://Radarbanyuwangi.Jawapos.Com/Read/2019/04/13/131655/Mirip-Gudang-Rongsokan-Warga-Enggan-Mengambil-Kendaraanya>. Diakses Pada Tanggal 10 November 2019.

di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanpa penutup apapun. Mobil dan truk yang diparkir di tempat terbuka itu juga terkena hujan dan teriknya sinar matahari setiap hari. Praktis, korosi menggerogoti bagian besi mobil, motor, dan truk tersebut. Selain di Banyuwangi, juga terjadi di Kejaksaan Negeri Bengkulu sebelum adanya Gudang penyimpanan barang bukti milik Kejaksaan Negeri Bengkulu yang dibangun pada tahun 2018 kemarin, dimana perawatan dan penjagaan barang bukti tidak bisa maksimal dan rumah barang sitaan negara milik Kemenkumham yang terus terisi.¹⁶

Dengan belum Optimalnya Penyimpanan dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh Beberapa Kejaksaan Negeri di Indonesia, tentunya dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada barang bukti sitaan khususnya kendaraan bermotor. Sedangkan akibat dari kerusakan tersebut dapat merubah Nilai kualitas maupun kuantitasnya, dan juga menciderai hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta menciderai keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Hal ini menarik untuk dikaji, ketika banyak fenomena kurang optimalnya perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan tentu dapat menyebabkan kerusakan barang bukti sitaan tersebut, dan tentu ada pihak yang dirugikan (pemilik barang bukti sitaan ataupun Negara), namun ada pula pihak yang harus bertanggungjawab.

¹⁶ Fitriani Waris Nur. *Gudang Baru Barang Bukti Kejari*, Mulai Difungsikan. <https://betvnews.com/gudang-baru-barang-bukti-kejari-mulai-difungsikan/>. Diakses Pada Tanggal 13 November 2019.

Berdasarkan uraian penulis diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang sedang terjadi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN KEJAKSAAN NEGERI TERHADAP KERUSAKAN BARANG BUKTI SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang?
2. Bagaimana kendala dalam proses perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor mengalami kerusakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan dan penerapan ilmu yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, manfaat penelitian ini juga sebagai syarat menyelesaikan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama atau penelitian lanjutan khususnya terhadap Pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Terhadap Kerusakan Barang bukti sitaan Berupa Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh terkait Pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Terhadap Kerusakan Barang bukti sitaan Berupa Kendaraan Bermotor.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya di bidang praktisi hukum mengenai Mekanisme serta kendala dalam Pengelolaan dan Perawatan oleh kejaksaan negeri dan juga mengenai Pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Terhadap Kerusakan Berupa Kendaraan Bermotor yang tidak diatur secara jelas oleh KUHAP.

F. Metode Penelitian

Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai pedoman untuk menganalisa, memahami, dan mempelajari suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis sosiologis.¹⁷ Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit UI-Press. Hal 6-7.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui mekanisme perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri kota malang dan bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan, yang tidak diatur lengkap dalam KUHAP.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi, data-data, dan fakta yang terkait dengan judul “Pertanggungjawaban Kejaksaan Terhadap Kerusakan Barang bukti sitaan Berupa Kendaraan bermotor”, dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang yang berlokasi di Jl. Simpang Panji Suroso No.5, Polowijen, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Nomor telepon (0341) 480303, email: info@kejari-malang.go.id.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang menjadi acuan mengerjakan penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

- d) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Individu, Keluarga dan Harta Benda.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN di Undangkan Dalam Berita Negara RI Tanggal 25 Juni 2014 Nomor 876 Pengganti Permenkeh No. M.05-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
 - g) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-112/JA/10/1989 Tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan, dan Penataan Barang Bukti.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana meliputi skripsi, tesis dan desertasi serta literatur lain seperti website-website.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu berupa: Kamus Hukum; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada:

- 1) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
- 2) Staff di Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
- 3) Aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang lainnya

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer,

c. Analisa Data

Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
- 2) Reduksi Data Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu - waktu diperlukan.
- 3) Penyajian Data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang di peroleh. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

G. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Adapun sistematikanya adalah:

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi penulisan atau penelitian, kegunaan penulisan atau penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian, dijelaskan mengenai macam-macam pertanggungjawaban, pengertian barang bukti sitaan, dasar hukum barang bukti sitaan, fungsi dan manfaat barang bukti sitaan, ruang lingkup kejaksaan dan tugas kejaksaan terhadap barang bukti sitaan, dan dasar hukum pengelolaan barang bukti sitaan terkait.

3. Bab 3: Hasil Penelitian

Berisi tentang hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan (empiris). Bab ini menguraikan mengenai mekanisme perawatan dan pengelolaan barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kejaksaan negeri kota malang, kendala selama proses pengelolaan barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor, dan bentuk pertanggungjawaban kejaksaan Negeri Kota Malang apabila barang bukti sitaan berupa kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan.

4. Bab 4: Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan.

